

**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Alamat : Jl. Bukit Raya Komplek Perkantoran Bukit Hibul Telpun (0532) 2071075 - Fax (0532) 2071075
NANGA BULIK 74662



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Alamat : Komplek Perkantoran PEMDA Lamandau, Bukit Hibul
Nanga Bulik 74662

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR : 660/ 590.1 / DLHK/IX/2023

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau tahun 2023, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024. Dalam penyusunan dokumen ini mengacu dari Perubahan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan/RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun (2024-2026) ;
- b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Pemerintah.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 tahun 2019 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2021 Nomor 198, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 245);
13. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 477);
14. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 21 Tahun 2023 tanggal 3 Juli 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 ((Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 893).
15. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 33 Tahunj 2023 Tanggal 21 Juli 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 ((Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 901).

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN LAMANDAU TENTANG RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024.**

- KESATU : Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau Tahun 2024 adalah pedoman atau arah kebijakan, prioritas dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana Dokumen terlampir pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, bertujuan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada Tanggal, 01 September 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Kabupaten Lamandau,



ARTO., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19650518 199403 1 010

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunia-NYA penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan pada waktunya.

Rencana Kerja ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sebagai acuan/ penoman untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau Tahun 2024 ini. Masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi penulisan maupun kualitas materi yang sangat jauh dari harapan. Oleh sebab itu saran dan masukan yang bersifat konstruktif sangat kami perlukan demi penyempurnaan. Harapan kami apa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2024.

Sebagai akhir kata, dengan berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau senantiasa berusaha menjalankan tugas sesuai dengan rencana yang telah tersusun, sehingga dapat berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Nanga Bulik, 01 September 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Lamandau,


IP. SUDARTO, M.A.P
Pemula Utama Muda
NIP. 19650518 199403 1 010

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	6
2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Kerja	9
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	11
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	15
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	15
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	15
3.3. Program /Kegiatan dan Sub kegiatan.....	16
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	20
BAB V PENUTUP	22
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1. Rencana Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan.....	7
Tabel 2.2. Rencana Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau Renstra 2024 – 2026.	10
Tabel 3.1. Keterkaitan Isu dan Kebijakan Kabupaten, Propinsi, Nasional	15
Tabel 3.2. Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Utama Tahun 2024	17
Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program/ Kegiatan / sub Kegiatan SKPD Tahun 2024.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun ke depan. Fungsi Rancangan Renja OPD adalah dokumen sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis OPD. Rancangan Renja OPD memuat hasil evaluasi renja tahun sebelumnya, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, dan pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan, dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis OPD. Dengan demikian Rancangan Renja OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra OPD dan salah satu dokumen dari Sistem Akutabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam laporan kinerja yaitu Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau Tahun 2024 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 tahun 2019 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2021 Nomor 198, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 245);
13. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 477);
14. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 21 Tahun 2023 tanggal 3 Juli 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 ((Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 893).

15. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 33 Tahun 2023 Tanggal 21 Juli 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 901).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau Tahun 2024 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja OPD dan Rencana Kerja Anggaran OPD. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau adalah :

1. Mendeskripsikan program – program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau;
2. Pelaksanaan program-program tersebut sesuai dengan yang diharapkan melalui fokus pada program - program prioritas.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada bab ini memuat review rencana pelaksanaan Renja OPD tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2024 tahun berjalan.

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Kabupaten Lamandau dengan APBD sebesar Rp. 9.596.481.206,-

Evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau dan Rencana Pencapaian Renstra Tahun 2024 (tahun berjalan) pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Rencana Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

NO	Program	Kondisi Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
			2024		2025		2026	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
LINGKUNGAN HIDUP								
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	4.668.118.465	100%	4.684.718.474	100%	4.732.969.260
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	100%	35%	116.387.698	50%	119.902.606	100%	119.902.606
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	87,5%	62,5%	248.881.485	72,5%	261.449.754	87,5%	261.449.754
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	45%	35%	42.981.969	40%	42.981.969	45%	28.436.424
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	22%	18%	44.999.885	20%	45.904.383	22%	45.904.383

6	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	60%	50%	125.460.056	55%	125.460.056	60%	125.460.056
7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	100%	100%	25.658.876	100%	25.658.876	100%	25.658.876
8	Program Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	30%	10%	71.820.406	20%	71.820.406	30%	71.820.406
9	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	100%	31.404.106	100%	31.404.106	100%	31.404.106
10	Program Pengelolaan Persampahan	75%	65%	4.075.758.504	70%	4.075.758.504	75%	4.075.758.504
KEHUTANAN								
11	Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	100%	33%	145.009.756	66%	145.009.756	100%	145.009.756
				9.596.481.206		9.630.068.890		9.663.774.131

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Rencan Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupten Lamandau adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis DLHK. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja DLHK Kabupaten Lamandu menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh DLHK Kabupaten Lamandau selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025 dan 2026. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

a. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing yang telah ditetapkan.

b. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Terkait dengan Indikator Kinerja Utama DLHK Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 khususnya pada target tahun 2024. Capaian masing-masing Indikator Kinerja Utama DLHK Kabupaten Lamandau dengan mencermati capaian program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran dalam Renstra DLHK Kabupaten Lamandau 2024-2026 dapat di lihat pada tabel berikut

**Recana Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Lamandau Renstra 2024- 2026**

No	Indikator	SPM /Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis	
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2024	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n-3)	(thn n-1)	(thn n-2)	(thn n-3)	(thn n-1)	(thn n-1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			75,06	75,33	75,6	-	-	-	85,4	-	
2.	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan serta peraturan per-UU bidang Lingkungan Hidup			80%	90%	100%	-	-	-	80%	-	
3.	Terlibatnya masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan pengelolaan TAHURA			50%	75%	100%	-	-	-	55%	-	
4.	Persentase Kegiatan Peningkatan dalam Pengelolaan Persampahan			75%	85%	100%	-	-	-	80%	-	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Permasalahan dan Hambatan

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui peilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024, serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau masih menghadapi permasalahan dan hambatan yang meliputi:

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan tetap sehat.
2. Perubahan kondisi lingkungan yang tidak bisa diprediksi menyebabkan data yang didapat bergantung kepada kondisi lingkungan saat pengambilan sampel
3. Rendahnya tanggung jawab pelaku usaha/kegiatan terhadap resiko dari kerusakan lingkungan yang terjadi akibat usaha/kegiatan yang dilaksanakannya
4. Jalur birokrasi yang panjang dan berbelit-belit dalam pengurusan kelengkapan dokumen untuk mendapatkan penunjukkan dan penetapan TAHURA Kabupaten Lamandau
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah dan membuat kota bebas dari sampah salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan.
6. Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi bidang lingkungan.

Dari permasalahan diatas, maka untuk kedepan perlu dilakukan penjadwalan pengambilan sampel pada saat keadaan lingkungan stabil berdasarkan data yang telah diperhitungkan, perlu ditingkatkan pengawasan yang intensif terhadap dunia usaha/kegiatan dan memberi sanksi yang tegas atas pelanggaran yang beresiko menimbulkan kerusakan lingkungan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan saling koordinasi lintas sektor yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Berkoordinasi secara terus menerus dan menyiapkan dokumen sebagai persyaratan kelengkapan dokumen usulan penunjukkan dan penetapan TAHURA dengan lengkap. Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan melaksanakan sosialisasi tentang penanganan dan pengelolaan sampah yang baik. Dan peningkatan SDM yang berkompeten melalui bimtek dan penempatan SDM sesuai dengan bidang ilmu dan kompetensinya.

2.3.2. Tantangan dan Peluang

a. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, meliputi :

1. Keterbatasan sumber daya manusia
2. Adanya pandemic Covid-19 yang berdampak serius terhadap sector ekonomi dan social budaya masyarakat seta pula mempengaruhi kinerja pelayanan pembangunan daerah.
3. Tidak semua program kegiatan DLHK dapat tertampung pada APBD dikarenakan keterbatasan anggaran.
4. Banyaknya peraturan perundangan yang terus mengalami perubahan dalam bidang lingkungan hidup.

b. Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, meliputi :

1. Penambahan jumlah pegawai yang memiliki kompetensi, keahlian.
2. Peningkatan profesionalisme pegawai DLHK.
3. Penerapan teknologi informasi dapat menyebabkan perubahan pada kebiasaan kerja, sehingga dapat memenuhi tujuan efektifitas dan efisiensi.
4. Konsisten dan sinkronisasi antara perencanaan, penggaran, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan.

2.3.3 Isu-isu Penting

a. Isu Internal

1). Tugas Pokok dan Fungsi

- Dalam setiap pengambilan keputusan, belum sepenuhnya berpedoman pada prinsip-prinsip fungsi lingkungan hidup dan Kehutanan karena dalam proses pengambilan keputusan masih mempertimbangkan kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat.
- Masih adanya perbedaan prinsip diantara *stake holder* dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengendalian/pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

- Dukungan kekuatan politik terhadap masalah lingkungan hidup dan kehutanan masih lemah, belum mengarah keberpihakan kepada masyarakat lokal.
- Masih terbatasnya sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.
- Penerapan sanksi hukum bagi para pelanggar dalam sektor lingkungan hidup dan kehutanan masih terlalu lemah.
- Minimnya dukungan anggaran menjadikan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dibandingkan dengan lajunya kerusakan dan pencemaran lingkungan.

2). Sumber Daya Manusia Aparatur

- Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tipoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Topoksi dengan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

3). Sarana dan Prasarana

- Mengembangkan perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.
- Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
- Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.

4). Keterbatasan kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah

Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamandau. Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonomi harus mampu membiayai seluruh kebutuhan

daerah, sehingga Kabupaten Lamandau menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan. Sehingga tidak semua program dan kegiatan yang disusun dapat disetujui penganggarnya. Diperlukan kreativitas dan inovasi dalam menyikapi keterbatasan anggaran sehingga dapat menampung semua aspirasi dan program yang ada.

b. Isu Eksternal

1). Globalisasi

Seiring kemajuan jaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti perkembangan teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan yang sejajar agar daerah dapat berkembang dengan pesat. Kemajuan teknologi di bidang teknologi, transportasi, telekomunikasi, dan informasi telah menciptakan dunia tanpa batas, memudahkan terjadinya mobilitas manusia antar daerah maupun pertukaran informasi melalui dunia maya.

2). Peraturan Perundang-Undangan

Gerakan reformasi birokrasi telah mendorong dilaksanakannya berbagai perubahan-perubahan mendasar dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang berprinsip pada *good and clean governance* serta melibatkan partisipasi masyarakat, transparan, dan akuntabel. Dibutuhkan komitmen dari semua pemangku kepentingan, pemerintah, dan masyarakat serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya penyelenggaraan *good governance* dan pembangunan dapat berlangsung secara optimal, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

TABEL 3.1.

Keterkaitan Isu dan Kebijakan Kabupaten, Provinsi, Nasional

No.	Kebijakan		
	Kabupaten	Provinsi	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Ekonomi Berbasis Lokal dengan Tetap Menjaga Kelestarian Alam dan Lingkungan	Pengembangan Ekonomi Unggulan Daerah yang mengutamakan lingkungan hidup	Komitmen terhadap Sustainable Development Goals (SDGs)
2.	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu	Komitmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia Bebas Sampah 2020
3.	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	penyusunan dan menetapkan baku mutu lingkungan, baku mutu sumber pencemaran dan baku kerusakan lingkungan	pembangunan harus sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah untuk mencapai sasaran strategis IKLH yang tetap terjaga

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

TUJUAN

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup harus mampu merespon dan bersinergi terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lamandau. Untuk itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyusun tujuan sebagai bentuk respon dan sinergi terhadap visi Kabupaten Lamandau Tahun

2024-2026 yaitu **"Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Secara Inklusif melalui Kelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang merata."**, memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau. Hal ini ditunjukkan melalui misi **"Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis sektor unggulan dan kelestarian lingkungan hidup"**. Maka dirumuskan tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Lingkungan Yang Asri dan Lestari Guna Mendukung Pembangunan Hijau Yang Berkelanjutan.

SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan Nilai Indek Kualitas Lingkungan Hidup .
2. Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan per-UU bidang LH;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian SDA dalam kawasan TAHURA .
4. Pengembangan Kinerja dalam Pengelolaan Persampahan.

3.3. Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup daerah dan membantu Bupati Lamandau dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan Kehutanan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dirancang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau Tahun 2024 hasil pemetaan program, kegiatan, sub kegiatan pada RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan/RPJMD Kabupaten

Lamandau sesuai PERMENDAGRI 90 Tahun 2019 terdiri dari 10 program, 12 kegiatan dan 23 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Utama

Program, kegiatan, dan sub kegiatan utama /prioritas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat di lihat dalam Tabel 3.2

Tabel. 3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Utama Tahun 2024

No	Prioritas Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
			Pengendalian pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota
2.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut
			Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
	-	Penanggulangan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat
3.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
4.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Fasilitas pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

			Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
			Penyusunan Kebijakan kerjasama Pengelolaan Persampahan
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah Yang Diselenggarakan Oleh Pihak Swasta	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah
10.	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Pengelolaan Taman Hutan Raya(TAHURA) Kabupaten/Kota	Perencanaan Pengelolaan TAHURA

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan SKPD Tahun 2023, sebagaimana Tabel 3.3 (Terlampir).

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan SKPD Tahun 2024

Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
Tujuan	Sasaran	Program			2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Secara Inklusif melalui Kelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang merata.	Meningkatkan SDM dan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup secara Terintegrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100%	100%	4.668.118.465	100%	4.684.718.474	100%	4.732.969.260	100%	4.732.969.260	DLHK
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Secara Inklusif melalui Kelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang merata.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	100%	35%	116.387.698	50%	119.902.606	100%	119.902.606	100%	119.902.606	DLHK
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Secara Inklusif melalui Kelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang merata.	Meningkatkan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase kecamatan dengan kondisi lingkungan hidup yang baik	87,5%	62,5%	248.881.485	72,5%	261.449.754	87,5%	261.449.754	87,5%	261.449.754	DLHK
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Secara Inklusif melalui Kelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang merata.	Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat mengenai pelestarian SDA	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase jenis keanekaragaman hayati yang lestari	45%	35%	42.981.969	40%	42.981.969	45%	28.436.424	45%	28.436.424	DLHK
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Secara Inklusif melalui Kelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang merata.	Meningkatkan ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan per- UU bidang LH	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase perusahaan penghasil limbah B3 yang memenuhi komitmen pengelolaan LB3	22%	18%	44.999.885	20%	45.904.383	22%	45.904.383	22%	45.904.383	DLHK

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Secara Inklusif melalui Kelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang merata.	Meningkatkan ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan per- UU bidang LH	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan per-UU bidang lingkungan hidup	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	50%	125.460.056	55%	125.460.056	60%	125.460.056	60%	125.460.056	DLHK
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Secara Inklusif melalui Kelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang merata.	Meningkatkan peran serta masyarakat hutan adat terhadap kearifan lokal	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang telah diakui keberadaannya	100%	100%	25.658.876	100%	25.658.876	100%	25.658.876	100%	25.658.876	DLHK
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Secara Inklusif melalui Kelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang merata.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Program Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase dunia pendidikan yang melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dengan baik (Adiwiyata)	30%	10%	71.820.406	20%	71.820.406	30%	71.820.406	30%	71.820.406	DLHK
Terwujudnya Lingkungan Yang Asri dan Lestari Guna Mendukung Pembangunan Hijau Yang Berkelanjutan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase pengaduan masalah Lingkungan Hidup yang tertangani	100%	100%	31.404.106	100%	31.404.106	100%	31.404.106	100%	31.404.106	DLHK
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Secara Inklusif melalui Kelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang merata.	Pengembangan kinerja dalam pengelolaan persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbunan Sampah yang tertangani	75%	65%	4.075.758.504	70%	4.075.758.504	75%	4.075.758.504	75%	4.075.758.504	DLHK
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Secara Inklusif melalui Kelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang merata.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian SDA dalam kawasan TAHURA	Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Persentase usulan Taman Hutan Raya (TAHURA) yang terverifikasi	100%	33%	145.009.756	66%	145.009.756	100%	145.009.756	100%	145.009.756	DLHK
TOTAL						9.596.481.206		9.630.068.890		9.663.774.131		9.663.774.131	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijelaskan terkait rencana kerja program / kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau Tahun 2024. Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau disesuaikan dengan hasil pemetaan ke dalam PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019 dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau.

Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau, kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau.

Rencana program/ kegiatan/ Sub Kegiatan dan pendanaan indikatif Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau Tahun 2023 dengan anggaran APBD sebesar **Rp. 9.645.877.605,-** yang terurai dalam **10 program, 12 kegiatan, dan 23 sub kegiatan** adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.410.109.158
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.525.578.678,00
- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3.525.578.678,00
Administrasi kepegawaian perangkat daerah	49.935.450,00
- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	49.935.450,00
- Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	0
Administrasi umum perangkat daerah	383.758.833,00

Rencana Kerja --- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	37.511.964,00
- Penyediaan peralatan rumah tangga	40.373.230,00
- Penyediaan bahan logistik kantor	14.599.800,00
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	23.189.825,00
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	17.640.000,00
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	245.466.000,00
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	597.362.343,00
- Penyediaan jasa surat menyurat	3.930.000,00
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	99.999.775,00
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	493.432.568,00
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	111.483.161,00
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	84.997.811,00
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	11.486.000,00
- Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	14.999.350,00
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	165.784.097,00
Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	116.387.698,00
- Penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	81.155.886,00
- Pengendalian pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	35.231.812,00
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	49.396.399,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	248.881.485,00
Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota	211.648.759,00
- Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	185.897.705,00
- Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca , mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	25.751.054,00
Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota	37.232.726,00
- Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	37.232.726,00
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	42.981.969,00
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	42.981.969,00
- Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Diluar Kawasan Hutan	42.981.969,00
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	44.999.885,00
Penyimpanan sementara limbah B3	44.999.885,00
- Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	22.499.976,00
- Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	22.499.909,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	87.147.015,00

Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	87.147.015,00
- Fasilitas pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	35.155.198,00
- Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	51.991.817,00
- Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas LH	0
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIPAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	25.658.876,00
Pengakuan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	25.658.876,00
- Koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait PPLH	25.658.876,00
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	71.820.406,00
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	71.820.406,00
- Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan / filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	71.820.406,00
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	69.717.147,00
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	69.717.147,00
- Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	31.404.106,00
- Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	38.313.041,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.075.758.504,00
Pengelolaan Sampah	4.075.758.504,00
- Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	14.998.256,00
- Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	3.964.593.878,00
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	38.224.573,00
- Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	19.994.000,00
- Penyusunan Kebijakan kerjasama Pengelolaan Persampahan	18.999.797,00
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah Yang Diselenggarakan Oleh Pihak Swasta	18.948.000,00
- Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	18.948.000,00
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	145.009.756,00
Pengelolaan Taman Hutan Raya(TAHURA) Kabupaten/Kota	145.009.756,00
- Perencanaan Pengelolaan TAHURA	145.009.756,00

BAB V

PENUTUP

Renja DLHK Kabupaten Lamandau merupakan dokumen perencanaan DLHK untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024, yang disusun berpedoman pada dokumen RPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026. Renja DLHK Kabupaten Lamandau Tahun 2024 memuat gambaran kinerja DLHK Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai kewenangan yang dimiliki terkait urusan lingkungan hidup dan kehutanan pada tahun berjalan dan menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan di tahun 2024.

Renja DLHK Kabupaten Lamandau selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja DLHK Kabupaten Lamandau, untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang nantinya akan ditetapkan dalam renja DLHK Kabupaten Lamandau tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/ pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Oleh karena itu penyelenggaraan seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja DLHK Kab. Lamandau akan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja DLHK Kab. Lamandau Tahun 2024 dapat berjalan efektif, efisien dan akuntabel maka disusun kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan yang akan dirumuskan dalam Renja DLHK Tahun 2024 setelah diselaraskan dengan RKPD tahun 2024.
- b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD Tahun 2024 dengan berpedoman kepada Renja DLHK tahun 2024 dan RKPD tahun 2024.
- c. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Renja DLHK tahun 2024 perlu melaksanakan pengendalian dan evaluasi program kegiatan tahun 2024.

d. Hal-hal yang tidak diatur dalam kaidah pelaksanaan ini, dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan erundang-undangan yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut disusunnya Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Lamandu tahun 2024, maka perlu Koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antara unsur eksekutif dan legislatif agar perencanaan program dan kegiatan tahun 2024 dapat berjalan lancar.

Demi kesempurnaan dokumen ini, maka saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan. Kami juga berharap agar dokumen ini dapat digunakan sebagai dasar dan bahan pertimbangan dalam merumuskan program/kegiatan urusan lingkungan hidup dan kehutanan Tahun 2024.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Lamandau,



Ir. SUNARTO, M.A.P

Pembina Utama Muda

NIP. 19650518 199403 1 010

LAMPIRAN

Rencana Kerja --- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KESKATAN / SUB KESKATAN	INDIKATOR PROGRAM / KESKATAN / SUB KESKATAN	TARGET AKHIR PERIODE REKSTRAS OPD	REALISASI CAPAIAN REKSTRAS OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REKSTRAS OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN BALAJI PRIBADI TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENGANGKUTAN JAWAB
							TARGET 2024	PADU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY			TARGET	PADU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN						3.645.877.825,00							3.595.342.135,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WALAH YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.500.867.849,00							3.492.892.389,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						3.500.867.849,00							3.492.892.389,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase tingkat intervensi administrasi perencanaan	-			100 %	4.988.118.485,00						-	4.918.183.315,00	
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				3.525.578.578,00			-	Peningkat n Kualitas / infrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjut an yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-	-	3.525.578.578,00	DINAS LINGKUNGAN-HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orangbulan	3.525.578.578,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkat n Kualitas / infrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjut an yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-	-	3.525.578.578,00	DINAS LINGKUNGAN-HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-				49.935.450,00			-	Peningkat n Kualitas / infrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjut an yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN-HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUTAN / ELEMEN / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Rakas Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjutan an yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				31 Orang	49.935.450,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjutan an yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				383.758.833,00			-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjutan an yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-	-	383.758.833,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.978.014,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjutan an yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-		4.978.014,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKHIR PERIODE RESTRADA OPD	CAPAIAN RENTAN TAHUN 2022	CAPAIAN TARGET RENTAN OPD TAHUN 2023	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Persebaran dan Perencanaan Kantor yang Disediakan				1 Paket	37.511.954,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Desa secara merata dan berkelanjutan yang menunjang keberdayaan ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-		37.511.954,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.01.2.06.0003		Penyediaan Persebaran Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Persebaran Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	40.373.230,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Desa secara merata dan berkelanjutan yang menunjang keberdayaan ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-		40.373.230,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.596.800,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Desa secara merata dan berkelanjutan yang menunjang keberdayaan ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-		14.596.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	23.159.825,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Desa secara merata dan berkelanjutan yang menunjang keberdayaan ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-		23.159.825,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	URAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 Dokumen		17.640.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjutan yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-		17.640.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan		245.486.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjutan yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-		245.486.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
								587.362.343,00			-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjutan yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-		587.362.343,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan		3.930.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjutan yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-		3.930.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRATRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENIA OPD TAHUN 2022	PRAKSIAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK BASARAN	TAHUN 2023		PERANGKAT DASAR PEMANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	99.999.775,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas I nfrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjut an yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-		99.999.775,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	493.432.568,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas I nfrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjut an yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-		493.432.568,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	111.483.161,00	-	-	-	Peningkata n Kualitas I nfrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjut an yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-	-	111.483.161,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	84.997.811,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas I nfrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjut an yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-		84.997.811,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKURAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	TAHUN 2025						KELOMPOK SASARAN	TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARJOT 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.09.0008	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	11.486.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas I nfrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjut an yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-		11.486.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	14.999.350,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas I nfrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjut an yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-		14.999.350,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	-			100 %	165.784.097,00						-	165.784.097,00	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-	-				116.387.698,00			-	Peningkata n Kualitas I nfrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjut an yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-	-	116.387.698,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAMBAH AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTAN OPD TAHUN 2022	CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1 Dokumen	81.155.886,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas I nfrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjut an yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-		81.155.886,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.02.2.01.0003 Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota																
			Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan				1 Dokumen	35.231.812,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.231.812,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	-				49.396.399,00			-	Peningkata n Kualitas I nfrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjut an yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-		49.396.399,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.02.2.02.0006 Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup																
			Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/risiko lingkungan hidup yang diusun				1 Dokumen	49.396.399,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas I nfrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjut an yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-		49.396.399,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.	2.11.03	PROGRAM PENGEENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kecamatan dengan kondisi lingkungan hidup yang baik	-			62,5 %	248.881.485,00						-	248.881.485,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG KELUAS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RESET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REKUISISI CAPAIAN RENUA OPD TAHUN 2022	PERENCANAAN DARIAN TARJET RENUA OPD TAHUN 2023	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAH	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	211.648.759,00	-	-	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjutan yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-	-	211.648.759,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	185.897.705,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjutan yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-		185.897.705,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	25.751.054,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjutan yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-		25.751.054,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	37.232.726,00	-	-	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjutan yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-	-	37.232.726,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peningkatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat														

No	Kode	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	STATUS PELAKSANAAN / REGISTRASI OPD	RENCANA KAPASITAS RENCANA OPD TAHUN 2023	TARJAH / TARGET NERJA OPD TAHUN 2023	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KEL. DPMPT BAKASARI	TARJAH	PAGU INDIKATIF (Rp)	REMARKS / CATATAN
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Sosialisasi/Informasi/Peningkatan Pemahaman dan Ketahanan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	-		1 Laporan		37.232.726,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjutan yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-		37.232.726,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase jenis keanekaragaman hayati yang lestari	-			35 %	42.981.969,00					-		42.981.969,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-				42.981.969,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjutan yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-		42.981.969,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.04.2.01.0001		Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	-		1 Dokumen		42.981.969,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjutan yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-		42.981.969,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
5.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAJA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAJA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase perusahaan penghasil limbah B3 yang memenuhi komitmen pengelolaan LB3	-			18 %	44.999.885,00					-		44.999.885,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.11.05.2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	-	-	-	-	-	44.999.885,00	-	-	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjutan yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-	-	44.999.885,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik															
		Jumlah Fasilitas Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	22.499.976,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjutan yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-		22.499.976,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3															
		Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				1 Laporan	22.499.909,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjutan yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-		22.499.909,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
6	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan per-UU bidang lingkungan hidup	-		50 %	87.147.015,00							-	87.147.015,00	

NO	KODE	URAIAN / BENTUK LEMBAGA / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE REVISI REVISI OPO	REVISI CAPAIAN REVISI OPO TAHUN 2023	CAPAIAN TARGET REVISI OPO TAHUN 2023	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	REVISI SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	SEKORONG JAWA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Penguasaan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						87.147.015,00			-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjutan yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana			87.147.015,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.06.2.01.0001	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				1 Dokumen	35.155.198,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjutan yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana			35.155.198,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				1 Badan Usaha	51.991.817,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjutan yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana			51.991.817,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang dilatihkan kapasitasnya				1 Orang	0,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjutan yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	KELOMPOK / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDUKTOR / PENYEDIAAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDUKTOR / PENYEDIAAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REVISI / CAPAIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REVISI / CAPAIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	SAKUPAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	REVISI / CAPAIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.	2.11.07	PROGRAM PENGUKUHAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang telah diakui keberadaannya	-			100 %	25.658.876,00						-	25.658.876,00	
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-	-				25.658.876,00			-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjutan yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-	-	25.658.876,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.07.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				1 Dokumen	25.658.876,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjutan yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-	-	25.658.876,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
8.	2.11.08	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah penghargaan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat Nasional yang didapatkan (Adipura) Persentase dunia pendidikan yang melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dengan baik (Adiwiyata)	-			1 Penghargaan 10 %	71.820.406,00						-	71.820.406,00	
	2.11.08.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-				71.820.406,00			-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjutan yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-	-	71.820.406,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	REKAP OPD TAHUN 2022	TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRORITAS NASIONAL	DAERAH	REKAP 2023	TARGET	REKAP 2024	REKAP 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					1 Entitas	71.820.406,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjutan yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-		71.820.406,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
9.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masalah Lingkungan Hidup yang tertangani	-			100 %	69.717.147,00						-	69.717.147,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-	-				69.717.147,00			-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjutan yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-		69.717.147,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				1 Pengaduan	31.404.106,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjutan yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-		31.404.106,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENUA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah penerapan sanksi/ administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kevenangan kabupaten/kota				1 Perkara	38.313.041,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjutan an yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-		38.313.041,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
10.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Timbunan Sampah yang tertangani	-			65 %	4.075.758.504,00						-	4.075.758.504,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-	-				4.056.810.504,00			-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjutan an yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-	-	4.056.810.504,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.11.2.01.0004		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan														
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				5 Kelompok	38.224.573,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjutan an yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-		38.224.573,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.11.2.01.0005		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Pasaran dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrade				1 Dokumen	19.994.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjutan yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-		19.994.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPSR, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan															
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPSR, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				1000 Ton	3.964.593.875,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjutan yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-		3.964.593.875,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah															
			Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah				1 Laporan	14.986.256,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjutan yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-		14.986.256,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan															
			Jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan				1 Dokumen	18.999.797,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjutan yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-		18.999.797,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENUA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Dielenggarakan oleh Pihak Swasta	-	-				18.948.000,00			-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjutan yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-	-	18.948.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.11.2.03.0002 Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah																
		Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja				1 Unit		18.948.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjutan yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-		18.948.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PULIHAN						145.009.756,00							145.009.756,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						145.009.756,00							145.009.756,00	
1.	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase utusan Taman Hutan Raya (TAHURA) yang terverifikasi	-			33 %	145.009.756,00						-	145.009.756,00	
	3.28.04.2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	-	-				145.009.756,00			-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjutan yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	-	-	145.009.756,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.2.01.0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA														

4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan				2 Dokumen	145.009.756,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjutan yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana	
JUMLAH					9.645.877.605,00					